

KPK Setor Rp5 Miliar dari Kasus Suap Mantan Bupati Bangkalan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyertorkan Rp5 miliar ke kas negara dari kasus suap terkait lelang jabatan dan pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Sebelumnya, KPK telah mengeksekusi mantan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron ke Lapas Sukamiskin dalam kasus tersebut.

"Jaksa eksekutor KPK Irman Yudiandri melalui biro keuangan telah melakukan penyetoran uang rampasan sebesar Rp5 miliar yang sebelumnya berstatus barang bukti dalam perkara terpidana R Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (22/9).

Setoran tersebut kemudian diperhitungkan sebagai pengurang terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti dari Abdul Latif.

Sebelumnya, KPK mengeksekusi R Abdul Latif Amin Imron ke Lapas Sukamiskin Bandung. Eksekusi tersebut

setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya memvonis Imron atas kasus dugaan suap terkait lelang jabatan dan pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Bangkalan.

"Jaksa Eksekutor KPK Nanang Suryadi, telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan Terpidana R Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (22/9).

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Imron divonis dengan masa kurungan badan selama sembilan tahun. Selain itu, Imron diwajibkan membayar pidana denda Rp300 juta.

"Ditambah dengan kewajiban tambahan lain berupa membayar uang pengganti sebesar Rp9,7 miliar," ujarnya. ● han

Prajurit Kostrad Lecehkan Bawahan Sudah Serahkan Diri dan Ditahan

JAKARTA (IM) - Oknum prajurit Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad), Letnan Satu (Lettu) AA, yang diduga melakukan tindakan asusila ke sejumlah bawahannya telah menyerahkan diri. Kini yang bersangkutan telah ditahan.

Kepala Penerangan (Kapen) Kostrad Kolonel (Inf) Hendhi Yustian mengatakan, AA kini diperiksa di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Jaya 1/Tangerang.

"Pelakunya sudah kami amankan, memang sementara ditahan di Denpom I Tangerang," kata Hendhi saat dihubungi, Jumat (22/9).

Hendhi menyebutkan, terduga pelaku sempat kabur sebelum menyerahkan diri pada Kamis (21/9).

"Langsung dia menyerahkan diri, nah baru kemarin diserahkan ke Pom (Polisi Militer)," ujar Hendhi.

Dugaan asusila itu terungkap setelah salah satu terduga korban melapor pada

Sabtu (16/9). Peristiwa diduga terjadi di sebuah mes prajurit Kostrad di wilayah Serpong Utara, Tangerang Selatan.

"Itu masih didalami, kronologinya, kejadiannya, masih didalami," kata Hendhi.

Terduga pelaku merupakan komandan baterai artileri (Danrai) dari kesatuan Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Yonarahud) Kostrad. Dalam laporan berupa pesan berantai di media sosial, terduga korban ada tujuh orang. Namun, jumlah itu masih didalami lagi.

"Kalau dilihat dari pangkatnya, (terduga korban) bawahannya," ucap Hendhi.

Ia menambahkan, terduga pelaku akan dipesat dari kedinasan, jika tuduhan yang dilaungkan terbukti. "Hukuman pokoknya hukuman pidana," ujarnya. ● mei

WN Rusia Buronan Intelijen Dideportasi Imigrasi Denpasar

DENPASAR (IM) - Petugas Imigrasi TPI Kelas I Denpasar menggelandang seorang warga Rusia untuk dibawa ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kamis (21/9) sore. Pria berinisial MZ dideportasi karena izin tinggal sudah lama habis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, izin tinggal MZ telah melebihi batas hingga 813 hari atau hampir tiga tahun.

Kasubsi Informasi Keimigrasian Kanim TPI Kelas I Denpasar, Made Oka mengatakan, MZ ditangkap di vila di kawasan Ubud, Gianyar bersama kekasihnya PL. MZ menjadi target operasi alias buronan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Keimigrasian.

"MZ dinilai membahayakan keamanan negara khususnya Bali, terma-

suk di antaranya dua panggilan pengaduan masyarakat di Polresta Denpasar serta masuk Daftar Pencarian Orang Ditkrimum Polri," ucap Made Oka.

Made Oka juga menjelaskan, saat penangkapan petugas juga menyita barang bukti satu unit laptop, telepon selular, delapan buah senjata tajam, satu gas air mata, dua dokumen perjalanan Rusia, empat buah paspor, satu surat DPO Ditkrimum Polri, serta satu surat panggilan klarifikasi laporan pengaduan masyarakat Polresta Denpasar.

"MZ akan diterbangkan keluar Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Kamis malam menggunakan pesawat Emirates," tutupnya. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



DKPP GELAR SIDANG DUGAAN PELANGGARAN KEPP

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity Hadar Nafis Gumay (kedua kanan) dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka (kanan) selaku pengadu saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Jumat (22/9). Sidang pengaduan yang ditujukan kepada tujuh komisioner KPU tersebut terkait Pasal 8 ayat 2 dalam Peraturan KPU (PKPU) 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yakni regulasi penghitungan kuota bakal calon anggota legislatif (Caleg) perempuan minimal 30 persen.

Eks Kepala BAIS: Tak Usah Takut Jokowi Pegang Data Parpol, Intelijen Tetap Kerja

Publik tak perlu takut karena Presiden Jokowi ngaku pegang data intelijen soal daleman parpol. Sebab intelijen melaporkan semua hal ke presiden.

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) periode 2011-2013 Laksdya TNI (Purn) Soleman B Ponto mengatakan, tidak perlu takut terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku sudah pegang data "daleman" partai politik (parpol). Ponto meminta publik bersikap biasa saja.

Ponto mengatakan hal ini dalam program Satu Meja Kompas TV, dikutip pada Jumat (22/9).

"Enggak usah takut lah. Biasa itu," ujar Ponto.

Ponto menjelaskan, tidak akan terjadi apa-apa hanya karena Jokowi memegang data arah parpol dari intelijen. Apalagi, intelijen akan tetap terus bekerja, mau ditakuti masyarakat, ataupun tidak ditakuti.

"Mau ditakuti, enggak ditakuti, intelijen itu tetap bekerja. Dan prinsip intelijen tidak kelihatan, belum tentu dia tidak ada. Kalau ada pun, belum tentu itu bentuknya. Lalu mau diapain?" ungkapnya.

"Mau ditakuti? Kalau ditakuti ya belum tentu dia ada kok. Ndak ditakuti ya dia juga bisa ada. Jadi biasa-biasa saja (menyikapinya)," kata Ponto menambahkan.

Ponto mengingatkan bahwa intelijen memang melaporkan segala hal, termasuk harga cabai keriting sekalipun. Ponto menyebut, ketika masih menjabat sebagai Kepala BAIS TNI, dirinya melaporkan semua harga cabai keriting di semua pasar induk setiap pukul 08.00 pagi dan 20.00 malam.

"Itu saya laporan pagi jam 8 pagi, jam 8 malam, cabai keriting di seluruh pasar induk, kita laporkan itu. Tapi nanti di belakang itu kan kita akan dapat banyak kenapa hari ini (harga) naik (tapi) besok enggak? Kan gampang itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Memang Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu. Ia hanya menjelaskan bahwa informasi

itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujarnya. ● han

FOTO: ANTARA



KPK PERIKSA ANDHI PRAMONO

Tersangka Andhi Pramono (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/9). KPK memeriksa Andhi yang merupakan mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar tersebut terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Putusan Dewas KPK Atas Perkara Johanis Tanak Dinilai Terlalu Lembek

JAKARTA (IM) - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik putusan Dewan Dewas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Johanis Tanak tidak terbukti melanggar etik hanya lantaran chat yang dikirim dihapus sehingga tidak diketahui isinya.

Tanak merupakan Wakil Ketua KPK yang diduga melanggar etik karena berkomunikasi dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Idris Froyoto Sihite. Namun, majelis sidang etik Dewas KPK menilai Tanak tak terbukti bersalah lantaran

chat yang dikirim dihapus sehingga tidak diketahui isinya.

"Alasan telah dihapus sebelum dibaca sehingga menyadai konflik kepentingan membuat publik menduga bagaimana lunaknya sikap Dewas pada putusan ini," ujar Praswad dalam keterangan resminya, Jumat (22/9).

Praswad mengatakan, Tanak mengirimkan pesan itu kepada Sihite, salah satu saksi dugaan korupsi tunjangan kinerja (Tukin) di ESDM yang diusut KPK, secara sadar sebelum akhirnya dihapus. Ia menduga, tindakan itu membuktikan bahwa Tanak sebagai penegak hukum terbiasa berkomunikasi dengan

pemangku kewenangan.

Mengenai alasan bahwa komunikasi sudah dilakukan sejak Tanak belum menjadi Wakil Ketua KPK dan Sihite bukanlah tersangka juga menimbulkan persepsi yang berbahaya.

"Apabila digunakan logika tersebut maka berpotensi setiap insan KPK berhak melakukan komunikasi dengan berbagai pejabat publik selama belum menjadi tersangka," tutur Praswad.

Padahal, kata Praswad, salah satu cara menjaga independensi KPK adalah membuat jarak komunikasi pribadi dengan orang-orang yang memiliki posisi strategis.

"Publik mempertanyakan pertimbangan yang dilakukan oleh Dewas KPK," kata Praswad.

Ketua Indonesia Menggigil (IM) 57+ Institute itu juga menyebut putusan Dewas membuktikan bahwa KPK, baik di tingkat pimpinan, organisasi, maupun penguas sulit dipercaya. Karena sudah sulit dipercaya, Praswad menjadi ragu apakah lembaga itu masih layak dipertahankan.

"Ketika tidak ada yang dipercaya pada level kepemimpinan maka menjadi relevan pertanyaan apakah KPK memang tetap harus dipertahankan," ujar Praswad.

Sebelumnya, dua dari tiga anggota Dewas KPK yang menyidangkan perkara Tanak, Harjono dan Syamsuddin Harris memutuskan mantan Jaksa itu tidak terbukti melanggar etik. Mereka juga menyatakan martabat Tanak dipulihkan.

Alasannya, Tanak dinilai tidak terbukti melakukan komunikasi yang memuat benturan kepentingan lantaran pesannya telah dihapus. Sementara, pemeriksaan Dewas

tidak berhasil mengungkap isi pesan yang dihapus itu.

"Memulihkan hak Terperiksa Sdr. Dr. Yohanes Tanak S.H., M.Hum. dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula," tutur Harjono dalam sidang, Kamis (21/9).

Berbeda dengan Syamsuddin dan Harjono, anggota Dewas KPK lainnya, Albertina Ho menyatakan dissenting opinion atau pandangan yang berbeda. Menurut Albertina Ho, Tanak terbukti bersalah tidak memberitahu pimpinan KPK lain bahwa ia berkomunikasi dengan Sihite dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Albertina juga menilai tindakan Tanak menghapus chat itu karena ia menyadari isi pesannya memuat benturan kepentingan.

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan," kata Albertina. ● han

FOTO: ANTARA



KEPALA STAF KEPRESIDENAN TINJAU PELABUHAN SANUR

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) berbincang dengan wisatawan mancanegara yang akan menaiki kapal cepat saat meninjau Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (22/9). Kunjungan itu dilakukan Moeldoko untuk memantau pengelolaan pelabuhan dan kondisi kemacetan yang sering terjadi di kawasan Sanur seiring dengan terus meningkatnya pergerakan penumpang di Pelabuhan Sanur yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 2 dan ayat 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Tuan ALBERT JANUAR WIRAWAN bermaksud melakukan pengambilalihan dengan cara membeli 2.025 (dua ribu dua puluh lima) saham milik Nona ELIZABETH JANUARTI W (ELIZABETH JANUARTI WIRAWAN). Oleh karenanya Tuan ALBERT JANUAR WIRAWAN akan menjadi pemegang 4.775 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham atau 87% (delapan puluh tujuh persen) saham dalam PT PLANO IDETAMA GEMILANG, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan").

Bagi pihak-pihak yang terkait atau para kreditor yang berkeberatan atas rencana pengambilalihan tersebut, dapat mengajukan surat secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini, dengan alamat:

PT PLANO IDETAMA GEMILANG
Gedung Citywalk Sudirman Lt.2,
Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121,
RT 010, RW 001,
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10220

Jakarta, 23 September 2023
ALBERT JANUAR WIRAWAN
Direksi PT PLANO IDETAMA GEMILANG

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT OCEANIAS TIMBER PRODUCTS

Direksi PT Oceanias Timber Products, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari & Tanggal : 9 Oktober 2023
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Wisma Indocement lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan

dengan agenda:
- Persetujuan Perseroan mengadakan kerja sama pemanfaatan hutan dengan PT MAJU HILAU LESTARI berkedudukan di Jakarta Pusat dan/atau afiliasinya pada areal milik Perseroan yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan:
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Republik Indonesia Nomor SK.755/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tertanggal 13 September 2021;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Republik Indonesia Nomor SK.851/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tertanggal 24 September 2021.

dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direktur Perseroan.

Catatan:

- Pemegang Saham atau wakilnya yang sah yang akan menghadiri Rapat tersebut di atas diwajibkan untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau paspor (untuk pemegang saham yang merupakan badan hukum diwajibkan untuk menunjukkan kewenangannya untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan) sebelum memasuki ruangan rapat.
- Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah. Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperbolehkan bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat tersebut.
- Data-data atau bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan.

Jakarta, 23 September 2023

Direksi PT Oceanias Timber Products